

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BIDANG SOSIAL  
EKONOMI (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa  
Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simelue)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas  
dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos)

**OKTAVIANA**

**NIM: 1805905020021**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH-ACEH BARAT  
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman : fisip.utu.ac.id, Email: fisip@.ac.id

Meulaboh, 29 November 2022

Program Studi : Sosiologi  
Jenjang : S-1 (Strata 1)

### LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Oktaviana  
Nim : 1805905020021

Dengan Judul : Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Sosial Ekonomi (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simelue)

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

**Dr. Akmal Saputra M.A**

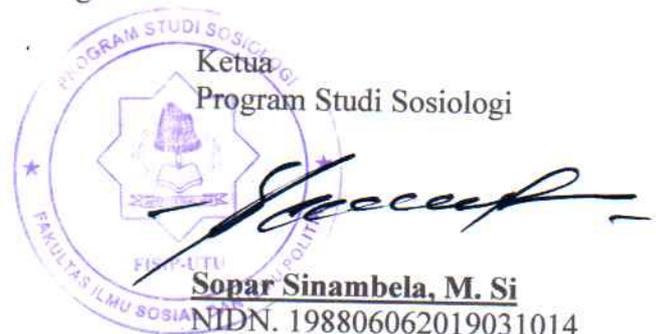
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Basri, S.H., M.P.**  
NIP. 196301011991021002

Ketua  
Program Studi Sosiologi



**Sopar Sinambela, M. Si**  
NIDN. 198806062019031014



Meulaboh, 31 Desember 2022

Program Studi : Sosiologi  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

### LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : OKTAVIANA

NIM : 1805905020021

Dengan judul : **PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI BIDANG SOSIAL EKONOMI (Studi Deskriptif Pada  
Masyarakat Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue)**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 30 November 2022.

Menyetujui :

Komisi Ujian

1. Ketua : Dr. Akmal Saputra M.A
2. Anggota : Rahma Husna Yana, S.Sos., M.Sos
3. Anggota : Samwil, M.A

Tanda Tangan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sosiologi



  
**Sopar Sinambela, M. SI**  
NIP. 1973022019980110

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oktaviana

Nim : 1805905020021

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagian tindakan penjiplakan. Sepanjangn pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi ini terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 07 Desember 2022

Saya yang membuat pernyataan



**Oktaviana**

NIM. 1805905020021

## KATA PERSEMBAHAN

Diriku adalah orang yang lemah dihadapan-Nya, namun hal itu lantas tidak pernah membuatku bersedih hati. Malah diri ini terus ingin bertumbuh dan berjuang  
*“Dan janganlah kamu berputus asah dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur” (QS. Yusuf:87)*

Alhamdulillahirabbil Aalamiin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, karena atas ridho-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang Islamiyyah.

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, saya persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua yang tercinta, Ayahanda **Suriyanto** dan Ibunda **Suharni**. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri. Terimakasih telah memberikan kasih sayang serta dukungan yang tidak mungkin dapat terbalaskan dan terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Saya persembahkan skripsi ini kepada saudara/I tersayang dan semua keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan hasil karya saya ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Dosen Pembimbing (**Dr. Akmal Saputra, M.A**) yang sudah membimbing serta memberikan masukan dan saran selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih kepada Dosen Penguji I saya Ibu **Rahma Husna Yana, S.Sos., M.Sos** dan penguji II saya Bapak **Samwil, M.A**, terimakasih telah memberikan masukan serta meluangkan waktu demi kesempurnaan skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan kepada **Fefen Rahmat Anugrah**, karena telah begitu baik dan simpatik. Terimakasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat saya membutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Khususnya untuk sahabat saya **Ita Amulia, Fitriani** terimakasih telah memberikan inspirasi, dorongan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan siapa-siapa untuk saat ini dan terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Sosiologi 2018 yang telah memberikan informasi, semangat dan dukungan yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi saya.

**OKTAVIANA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya bagi kita semua. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah ke zaman pencerahan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Studi Sosiologi Universitas Teuku Umar guna untuk meraih Gelar Sarjana Sosiologi (S. Sos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk orang tua Saya bapak Suryanto dan Ibu Suharni, terimakasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang tiada henti baik berupa moral ataupun materi serta doa yang selalu ditujukan untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
2. Ibu Cut Irna Liyana, S.Pd.I.,M.A selaku Penasihat Akademik yang telah memberi arahan, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Akmal Saputra, S.Sos. I., M.A Selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia menjadi dosen pembimbing dan bersedia meluangkan waktunya dalam proses bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Rahma Husna Yana, S.Sos., M.Sos. yang telah bersedia menjadi dosen penguji I dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Samwil, M.A yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai dosen penguji II dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen jurusan Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu politik yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh staf karyawan dan staf perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Keluarga besar Sosiologi angkatan 2018 yang telah memberikan informasi, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan laporan ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan penelitian ini.

Saya menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangakn lebih lanjut. Aamiin Yarabbal Alaamiin.

Meulaboh, 07 Desember 2022

Penulis

Oktaviana

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mendeskripsikan tingkat kesejahteraan program dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan sektor sosial ekonomi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Informan berjumlah 13 orang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan data dan hasil untuk memperoleh jenis data primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perubahan sosial. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan dana desa di desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ditinjau dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kehidupan memenuhi pendapatan atau kebutuhan jasmani, rohani dan kebutuhan sosial tidak efektif dan baru memulai kesepakatan pembangunan desa dengan membuat akses pembangunan infrastruktur gunanya untuk menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan pemerintah desa untuk membantu kebutuhan masyarakat yang belum optimal.

**Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Perubahan Sosial**

## ABSTRACT

*The pupose of this study is to see and describe the level of welfare of the village fund program in improving the welfare of the socio-economic sector of the community. The type of research used is this study esea a qualitative research design whit descriptive methods. This research was conducted in the village of Air Pinang, Simeulue Timur Destrict, Simeulue Regency. Informants amounded to 13 people. The techniques used in collecting data trhough interviews, observation and documentation. Researchers use data and results to obtain primary and secondary data types. The theory used in this research is the theory of social change. Based on the research results, it is known that the use of village funds in the village of Air Pinang, Simeulue Timur District, Simeulue Regency is viewed from the level of community welfare. Living conditions to meet income or physical, spiritual and social needs are ineffective and are just starting village development agreements by making access to infrastructure development connecting centers of economic growth and village goverment.*

*Keywords: Village Funds, Village Fund Management, Community Empowerment, Village Development, Social Change*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN KOMISI UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Pengelolaan Dana Desa .....	11
2.3 Dana Desa.....	14
2.4 Otonomi Desa .....	16
2.5 Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Sosial Ekonomi.....	16
2.5.1 Kesejahteraan.....	16
2.5.2 Sosial Ekonomi.....	17
2.5.3 Kesejahteraan Sosial Ekonomi .....	18
2.6 Nilai-Nilai Sosial .....	19
2.7 Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.8 Pembangunan Desa .....	22
2.9 Teori Perubahan Sosial.....	23
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Metode Penelitian .....	27
3.2 Lokasi Penelitian .....	27
3.3 Sumber Data .....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.5 Teknik Penentuan Informan .....	29

3.6	Instrumen Penelitian .....	29
3.7	Teknik Analisis Data .....	30
3.8	Uji Kredibilitas Data.....	30
3.9	Jadwal Penelitian .....	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN .....		32
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
4.1.1	Kondisi Demografi .....	33
4.1.2	Pembagian Wilayah Desa.....	33
4.1.3	Deskripsi Keadaan Ekonomi.....	34
4.1.4	Kesejahteraan Warga.....	36
4.1.5	Deskripsi Keadaan Sosial.....	36
4.1.6	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	37
4.1.7	Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Lainnya .....	38
4.1.8	Karakteristik Informan .....	39
4.2	HASIL .....	39
BAB V. PEMBAHASAN .....		53
5.1	Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Air Pinang .....	53
5.1.1	Kaitan Hasil Penelitian Dengan Teori Yang Digunakan .....	55
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....		58
5.2	Kesimpulan.....	58
5.3	Saran .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penentuan Informan .....	29
Tabel 2 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 3 Daftar Nama Dusun Desa Air Pinang .....	33
Tabel 4 Batas-Batas Wilayah Desa Air Pinang.....	33
Tabel 5 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	35
Tabel 6 Data Kesejahteraan Warga.....	36
Tabel 7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 8 Data Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Umum.....	38
Tabel 9 Data Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam setiap program, pengembangan desa ialah suatu sistem yang berfungsi sebagai pedoman untuk terjadinya penggalan potensi serta inisiatif masyarakat dalam mencakup sistem pembangunan agar tepat sasaran. Melalui program dana desa, desa sangat aktif dalam upaya pembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan desa secara mandiri. Dana desa merupakan cara untuk menunjang terciptanya pemerintah desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam aspek kebutuhan, pembangunan sarana prasarana, dan bisa memajukan kapasitas ekonomi lokal berdasarkan kondisi dan potensi desa, (Ridha, 2019).

Desa dibangun berdasarkan inisiatif masyarakat serta mengamati asal-usul desa dalam kehidupan masyarakat sekitar. Pembangunan desa dibentuk lebih dari satu desa, sebagian desa yang jaraknya dekat serta tumbuh kembangnya mulai satu desa menjadi dua desa. Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur serta mengurus keperluan masyarakatnya di seluruh komponen, diatur dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Dalam pemberian andil setiap kegiatan, pemerintah desa sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kegiatan dan dilihat dari sudut pandang kehidupan masyarakatnya, proses baru dan juga pedulinya pemerintah desa terhadap sarana prasarana desa untuk terciptanya pembangunan yang absolut.

Dana desa adalah dana yang diarahkan oleh pusat pemerintah untuk pembangunan dan meningkatkan kebutuhan masyarakat baik material, spiritual maupun sosial melalui tanggungjawab desa, tugas pemerintah desa untuk menyeimbangkan keinginan masyarakat dan urgensi desa. Pada dasarnya dana desa bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif dengan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata, (Zitri, 2020).

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil keterlibatan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kapasitas dan pembagian kebutuhan dasar yang adil seperti makanan, tempat tinggal dan kesehatan kemudian dikombinasikan dengan peningkatan standar hidup, tingkat pendapatan pendidikan yang mewakili skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial, individu dan nasional, (Tarood, 2006).

Desa memiliki asal usul pengaturan dan pengelolaan kepentingan masyarakat setempat serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Feiby Vencentia Tangkumahat, 2017). Ketersediaan dana desa dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa jika bangunan ditata dengan baik.

Desa Air Pinang yakni suatu desa berada di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mempunyai manajemen sendiri dalam mengelola keuangan desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Transparansi atau keterbukaan diutamakan untuk mereka dalam menciptakan pemerintah yang lebih baik dan dipercayakan untuk masyarakat.

Namun pemerintah desa Air Pinang, untuk melakukan tugas dan tanggungjawab pelayanan publik tidak terpenuhi secara optimal, sehingga

masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pelayanan publik tidak dapat mengurus kebutuhan masyarakat karena bergantung dengan kekurangan tenaga kerja yang digunakan untuk membantu masyarakat tersebut sehingga dapat berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa yang tidak teratur dengan baik dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan dana tersebut adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang administrasi, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai misinya dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan perkotaan di desa-desa yang sedang berkembang. Secara inklusif, sesuai dengan potensi desa dengan meningkatkan pemerataan pendapatan, masyarakat desa berusaha serta mendorong untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Berdasarkan tujuan dana desa diatas, pemerintah desa berharap pelaksanaan program pengelolaan dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan desa harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat di desa Air Pinang perlu dikaji untuk menganalisis dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengkaji sejauh mana perkembangan desa melalui berbagai upaya pemerintah desa. Oleh karena itu laju pertumbuhan desa ditentukan oleh upaya negara untuk memberikan pelayanan yang terbaik diberbagai tempat kehidupan dan peran pemerintah dalam mendukung upaya tersebut.

Di desa Air Pinang telah dilakukan kegiatan pembangunan di pemerintah desa, berbagai layanan infrastruktur fisik dan penunjang ekonomi seperti saluran

irigasi, perbaikan kantor desa, akses jalan menuju pertanian setempat dan kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan kerja dan pengembangan masyarakat. Namun, pengelolaan sumber daya desa tidak terdistribusi dengan baik sehingga tidak semua masyarakat dapat memanfaatkannya. Dari segi pertumbuhan pendapatan tidak merata karena tidak semua masyarakat terlibat dalam kegiatan pembangunan sehingga dampak pengelolaan dana desa belum sepenuhnya mempengaruhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, program pengembangan keterampilan khusus dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan dan kondisi sosial.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan terkait penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial ekonomi di desa Air Pinang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial ekonomi desa Air Pinang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis merupakan manfaat berupa teori yang digunakan dalam penelitian selanjutnya yang peneliti gunakan untuk mengembangkan teori-teori pembelajaran dan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa, adapun manfaat teoritis yaitu:

1. Diharapkan hasil penelitian dapat menambah pengetahuan masyarakat dan peneliti tentang bukti empiris serta dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa Air Pinang dalam pengelolaan perekonomian desa.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah sumber referensi tentang peran pemerintah desa Air Pinang di Kabupaten Simeulue Timur.
3. Diharapkan hasil penelitian dapat mendukung teori-teori yang sudah ada sebelumnya sehubungan dengan topik yang dibahas.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yaitu manfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menerapkan ilmunya pada masalah nyata, adapun manfaat praktis yaitu:

1. Sebagai penambah wawasan dan meningkatkan kemampuan akademis peneliti mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang sosial ekonomi.

2. Bagi sosiologi, penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya
3. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat memberikan masukan untuk para pembuat kebijakan dan khususnya terhadap masyarakat desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibutuhkan sistematika penulisan untuk mendapat deskripsi yang nyata perihal penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini terdiri atas landasan pemikiran atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat tentang penelitian terdahulu, hasil penelitian permasalahan yang serupa oleh para ahli dan penelitian lainnya yang diungkapkan dalam bab ini.

### **BAB III: Metodologi Penelitian**

Bab ini memuat tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, narasumber penelitian, teknik analisis data, uji kredibilitas dan waktu penelitian

### **BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini memuat masalah dari hasil yang terkandung baik dalam bentuk fakta maupun sebagai hasil analisis

### **BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini memuat tentang temuan-temuan penelitian dan kesimpulan dari masalah yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti, yaitu Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Sosial Ekonomi.

(Saputra, 2016) meneliti tentang Analisis Pengelolaan Dana Gampong Dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Gampong Belakang), masalah yang diteliti yaitu bagaimana manajemen pengelolaan dana gampong di gampong Belakang dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelola bagaimana pengelolaan dana gampong di gampong Belakang memberikan kontribusi untuk kesejahteraan bersama. Peneliti menggunakan metode kualitatif, data primer dan data sekunder digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya di gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sudah baik dalam memajukan kepentingan bersama. Dari sini terlihat bahwa rencana pengelolaan dana gampong direncanakan secara efektif dan teratur untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan perencanaan pengelolaan dana gampong terkoordinasi dengan baik yang tertuang dalam RKPG dan RPJMG. Gampong bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang

sejahtera sehingga pelaksanaan atau penyelenggaraan penatausahaan sumber daya desa yang dihimpun dalam RKPG untuk memajukan kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan baik berkat efisiensi dan transparansi pengendalian yang baik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dana desa salah satunya dikuasai oleh kepentingan masyarakat antara lain laporan rekening/LPJ dan SPJ yang diserahkan kepada BPKKD oleh bendahara gampong.

(Yunita, 2020) meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Gampong Pantom Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Pantom Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Pantom Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Pengelolaan yang dikemukakan oleh G.R. Terry yaitu pengelolaan atau manajemen dilakukan dengan melakukan 5 kegiatan pengelolaan atau fungsi yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*). Hasil penelitian ini bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Pantom Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan menyusun perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam pengelolaan sehingga semuanya terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Rahayu, 2017) meneliti tentang Startegi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa Kalikayen Tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa, mengidentifikasi pembangunan infrastruktur setelah adanya dana desa dan menentukan strategi. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat karena alokasi dana desa hanya dapat dilihat untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa. Strategi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa antara lain adalah meningkatkan efektivitas dana bantuan untuk perekonomian dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia serta meningkatkan kerja sama yang baik antar pemerintah negara dan desa sebagaimana dituangkan pada kebijakan pembangunan.

Dalam penelitian terdahulu memiliki perbedaan dan persamaan terhadap ketiga permasalahan yang sedang dibahas pada bab kajian pustaka, adapun yang menjadi kajian terdahulu dengan kajian yang sedang diteliti oleh penulis memiliki perbedaan dan persamaan. Menurut Saya dalam penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian pertama lebih menekan pada manajemen pengelolaan dana gampong, penelitian kedua lebih menekan kepada aspek alokasi dana desa untuk pembangunan dan peningkatan

infrastruktur fisik sehingga mekanisme pengelolaan dana desa tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Saya dalam penelitian ini memiliki persamaan dimana pada penelitian ini sama-sama melakukan kajian keuangan gampong/desa yang dapat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan dapat dilihat dari pengelolaan keuangan desa/gampong. Hal kajian terdahulu juga melakukan kajian tentang pengelolaan keuangan. Sedangkan penulis saat ini juga melakukan kajian yang sama yaitu tentang pengelolaan keuangan dana desa sehingga hal tersebut dianggap memiliki persamaan.

## **2.2 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan tanggungjawab. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta semua dana dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa sehubungan dengan penghasilan, pengeluaran, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Tentang pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No 6 Tahun 2014: (1) pendapatan awal desa yang terdiri dari dana desa, swadaya, gotong royong dan pendapatan awal desa lainnya, (2) alokasi dana desa disebut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (3) penyertaan hasil daerah dan pajak daerah Kabupaten atau Kota, (4) dukungan keuangan anggaran

pendapatan dan belanja daerah pemerintah atau kota, (5) oposional, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, (6) pendapatan lain yang sah.

Dana desa terutama digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengatasi kemiskinan serta masuk dalam rencana kerja perangkat desa. Adanya dana desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa yang berkembang. Untuk meningkatkan pendapatan desa milik pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan pokok, pemberdayaan desa dan kegiatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan ditetapkan melalui Musrembang Desa.

Dana desa terutama digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan desa yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dana desa diprioritaskan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan pendapatan dan mengembangkan skala ekonomi masyarakat desa.

Sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa merupakan bagian integral dari pengelolaan APBD ekonomi desa. Semua kegiatan dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan segala hambatan kegiatan masyarakat desa yang terkait harus dicatat secara administratif, instan dan Undang-Undang.

Dana desa digunakan secara efisien, adil dan terkendali. Dana desa digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa dengan membangun infrastruktur desa dan melakukan program penguatan masyarakat desa. Pemerintah desa bertanggungjawab untuk mengelola dana desa karena memiliki kedudukan tinggi di desa sehingga mempunyai kekuatan untuk mendistribusikan keuangan desa. Teknis pelaksana pengelolaan keuangan desa pada perangkat desa dipilih dan digunakan oleh Kepala Desa yaitu sekretaris, bendahara dan lembaga lainnya.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan selama satu tahun anggaran yaitu pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Alokasi tersebut dibuat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, negara menyediakan dana desa tertentu untuk desa pada setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian dana desa diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintah negara di desa diberikan bantuan keuangan umum yang penggunaannya tergantung sepenuhnya pada penerima. Bantuan khusus dialokasikan ke desa-desa dan pengelolaanya diputuskan oleh pemerintah kota yang membantu membangun desa dan penguatan masyarakat.

Kepala desa bertindak sebagai pemegang kewenangan untuk mengelola barang milik desa. Dalam menjalankan kekuasaannya, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa. Tujuan penyelenggara keuangan desa adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan mengembangkan pendapatan desa. Penatausahaan barang milik desa diatur dengan Undan-Undang.

### **2.3 Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Negara/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara negara, kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan penguatan masyarakat. Dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan implementasi dari dana desa. Salah satu bentuk pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan.

Filosofi dana desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan cara meningkatkan pelayanan publik desa, mengembangkan ekonomi desa, menghilangkan kesenjangan pembangunan antar desa dan memberdayakan desa sebagai sasaran pembangunan. Dana desa terutama digunakan untuk membiayai pembangunan dan semangat kemasyarakatan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Pelaksanaan kegiatan dana desa dikelola oleh badan kegiatan dana desa yang ditunjuk oleh pengurus masyarakat/walikota. Kegiatan yang dibiayai dari

dana desa dilakukan secara swadaya dengan sumber daya/bahan baku lokal dan bertujuan untuk menambah tenaga kerja masyarakat desa setempat.

Dalam mekanisme penyaluran dana desa sebagai berikut: (1) dana desa disalurkan secara bertahap dengan manfaat tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, (2) Kepala Desa mengusulkan penyaluran dana desa kepada camat disertai kelengkapan administrasi yang ditetapkan, (3) pendistribusian tahap kedua dapat dilakukan jika alokasi pembayaran pertama dianggap baik secara administratif maupun secara instansi dan hukum, (4) pendistribusian tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan cara mentransfer dana dari kas desa kepada bendahara desa, (5) penyaluran alokasi desa dari kas desa kepada pelaksana kegiatan.

Dana desa dibagikan kepada masing-masing desa agar dapat digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan yang sebelumnya telah keluar dari perundingan antar pengurus desa dengan masyarakat sesuai karakteristiknya. Pengelolaan perekonomian desa yang transparan dan inklusif dengan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip tanggungjawab. Desa bertanggungjawab kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan sehingga muncul pemerintah desa yang baik. Masyarakat juga harus dilibatkan dan diberdayakan dengan baik supaya memadai untuk peningkatan kesejahteraan.

## **2.4 Otonomi Desa**

Otonomi desa merupakan yang original dalam melaksanakan kewajiban dan wewenang untuk mengelolah serta mengurus rumah tangga sendiri dalam urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak istimewa dalam masyarakat untuk menguatkan dan meningkatkan perkembangan desa tersebut. Menurut (Widjaja, 2013) otonomi desa adalah otonomi yang nyata, bulat, utuh dan bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah wajib menghormati otonomi asli desa.

Secara umum dapat dikatakan bahwa desa adalah badan hukum yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, mengeluarkan perintah, menguasai tanah, mengeluarkan surat-surat dinas, berhubungan dengan pengadilan, berorganisasi, bergotong royong dan lain-lain. Namun, desa juga merupakan daerah otonom dan tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum tetapi juga sebagai bagian dari desentralisasi dan sebagai peserta dari sudut pandang hukum tetapi juga dari hubungan desa negara. Oleh karena itu, desa juga berhak memperoleh kekuasaan tidak hanya dalam penyelenggara negara tetapi juga dalam pengelolaan keuangannya.

## **2.5 Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Sosial Ekonomi**

### **2.5.1 Kesejahteraan**

Masyarakat pada dasarnya belum memahami dengan baik terkait dari makna pentingnya kesejahteraan. Kesejahteraan dalam istilah umumnya dapat dijelaskan dalam keadaan baik dimana keadaan seseorang atau sekelompok orang berkedudukan dalam kondisi yang makmur termasuk dalam keadaan

damai dan sentosa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, kesejahteraan sosial merupakan prasyarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup dan berkembang secara memadai untuk memenuhi kewajiban sosialnya.

### **2.5.2 Sosial Ekonomi**

Sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial yang ditentukan oleh jenis kegiatan ekonomi, pendidikan dan pendapatan. Sosial mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Dalam Sosiologi, manusia disebut sebagai makhluk yang memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lain. Oleh karena itu, makhluk sosial adalah konsep ideologis dimana masyarakat atau struktur sosial dipandang sebagai organisme hidup.

Sedangkan ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi sumber daya yang terbatas dan distribusinya diantara individu atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kata sosio-ekonomi terdiri dari dua kata yaitu sosial dan ekonomi. Sosio dalam bahasa Latin adalah *socius* artinya sahabat, sedangkan kata ekonomi dalam bahasa Yunani adalah '*oikonomikos*', '*oikonomia*', dari panggalan kata '*oikos*' sama dengan rumah dan '*nemein*' sama dengan mengurus, mengelola, (Zunaidi, 2013).

Secara keseluruhan, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kehidupan sosial ekonomi dapat dilihat sebagai

sistem sosial yang mencakup semua komponen atau faktor yang saling berkaitan sebagai kesatuan sosial.

### **2.5.3 Kesejahteraan Sosial Ekonomi**

Kesejahteraan sosial ekonomi adalah kondisi dan tatanan kehidupan sosial ekonomi yang sejahtera dimana setiap orang, kelompok atau komunitas dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya dengan sebaik-baiknya dan dikenal sebagai kebutuhan dasar manusia. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial merupakan prasyarat untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat negara agar dapat hidup dan berkembang secara memadai untuk mewujudkan urusan sosialnya. Penjelasan tersebut menepatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan.

Istilah kesejahteraan atau kemakmuran dapat memiliki empat arti yaitu:

(1) kesejahteraan secara umum mengacu pada kondisi manusia yang baik dimana masyarakat berada dalam keadaan sejahtera, sehat dan damai, (2) secara ekonomi, sejahtera selalu mengacu pada perolehan atau keuntungan material (ukuran material) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara normatif dan material dapat berarti kesejahteraan ekonomi dan finansial), (3), dalam konteks kebijakan sosial, jaminan sosial mengacu pada serangkaian layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, (4) bantuan sosial mengacu pada kontribusi keuangan yang dibayarkan oleh negara kepada orang-orang yang membutuhkan dukungan keuangan tetapi tidak mampu bekerja atau

penghasilannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar, jumlahnya biasanya jauh dibawah garis kemiskinan dan mungkin karena keadaan khusus seperti bukti pencarian kerja (pengangguran) atau keadaan lain seperti ketidakmampuan untuk bekerja, (Suryono, 2014).

Pengembangan ekonomi dapat dilihat dari upaya atau teknik dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan pemenuhan kepentingan masyarakat secara individu atau kelompok demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi masyarakat juga merupakan sistem pengelolaan yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan desa. Sistem pengelolaan juga harus dilaksanakan dengan konsep dan strategi yang matang karena prosesnya memadukan sumber daya manusia alam sehingga terwujud keberlanjutan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan masalah desa lainnya.

## **2.6 Nilai-Nilai Sosial**

Nilai sosial adalah nilai yang diyakini penduduk. Untuk menentukan sesuatu itu baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, harus dilakukan proses musyawarah. Beberapa ciri nilai sosial yaitu: (1) nilai sosial yang diperoleh melalui proses interaksi, (2) ditransformasikan melalui proses belajar yang dikaitkan dengan sosialisasi, (3) nilai sosial berupa kebijakan atau peraturan sosial juga memenuhi kebutuhan sosial, (4) setiap komunitas memiliki nilai yang berbeda, (5) setiap nilai sosial dalam masyarakat memiliki efek yang berbeda, (6) mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat.

Mengenai pengoperasian nilai-nilai sosial yaitu memajukan seperangkat norma sosial dapat menentukan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial, dapat membimbing anggota masyarakat dalam berpikir dan berperilaku karena masyarakat selalu dapat melihat bagaimana bertindak dan berperilaku dengan benar. Nilai sosial adalah nilai dalam memenuhi peran sosial, solidaritas antar anggota kelompok atau komunitas dan sebagai sarana untuk memantau atau mengendalikan perilaku orang. Ada beberapa jenis nilai sosial yakni nilai material yaitu upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya nilai kehidupan yang berguna bagi manusia. Nilai spiritual adalah nilai yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spiritual seseorang, nilai rohani merupakan nilai yang berfungsi untuk mencukupi keperluan rohani manusia yang bersifat umum.

Nilai-nilai sosial merupakan tempat perlindungan bagi pendukungnya, kekuatan perlindungan begitu besar sehingga pendukung siap berjuang mati-matian untuk melestarikan nilai-nilai tersebut, (Rachman, 2013). Nilai sosial tumbuh dari kepentingan kelompok sosial menjadi hasil pengelolaan berbagai kemauan penduduk selalu berubah dalam situasi yang berbeda.

## **2.7 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses perkembangan dimana masyarakat berinisiatif memulai suatu proses aksi sosial untuk memperbaiki keadaan seseorang. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat itu sendiri turut serta dalam pemberdayaan masyarakat sehingga diperlukan investasi. Dilihat dari sisi lain, pemberdayaan masyarakat dalam

konteks wacana pembangunan dan pembangunan alternatif sebagai jawaban atas kelemahan model pembangunan tradisional (pro pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan tetap mempertahankan masalah kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi berbagai masalah sosial yang melanda masyarakat, (Zubaedi, 2007).

Mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu prinsip kesetaraan. Dalam proses pemberdayaan penting untuk mengedepankan kesetaraan posisi masyarakat dengan lembaga yang menjalankan program pemberdayaan, masing-masing pihak mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling berbagi informasi, pengalaman dan dukungan. Dengan prinsip partisipasi, program berhasil mendorong kemandirian masyarakat jika bersifat partisipatif yaitu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Adanya asas otonomi dan kemandirian berarti menghargai kemampuan masyarakat dan mengutamakan menolong orang lain. Dalam konsep ini orang miskin tidak dilihat sebagai objek yang tidak mampu melainkan sebaliknya. Ini adalah prinsip berkelanjutan yang memainkan peran lebih dominan, tetapi secara bertahap perannya semakin berkurang karena masyarakat diharapkan mampu mengendalikan tindakan sendiri.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberdayakan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat yang paling penting dan mandiri. Kemiskinan dapat dilihat dari segi indikator ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut (Bintarto, 1989) pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, memperkuat potensi sumber daya atau energi masyarakat (pemberdayaan) yang terkandung dalam politik rakyat, memberi masukan dan membuka akses terhadap berbagai peluang yang diberikan. Masyarakat lebih banyak peluang untuk memanfaatkannya, melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan harus mencegahnya dari yang lemah menjadi bertambah lemah.

## **2.8 Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan proses total dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan kesejahteraan desa, (Siagan, 2003). Tujuan dari program pembangunan desa adalah untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat atas masa depan yang diinginkan. Proses pembangunan desa menciptakan sistem kehidupan masyarakat yang memperkuat demokrasi sehingga kebijakan pemerintah terhadap program pembangunan desa bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan setiap desa berbeda-beda, ada desa yang sangat maju dan ada desa yang sangat lambat dalam proses pembangunannya. Desa tersebut memiliki beberapa sebutan untuk prestasinya, antara lain desa adat dan desa swadaya. Kemajuan pembangunan desa tentunya tidak hanya secara fisik tetapi dapat dilihat dari sumber daya manusianya. Ada faktor-faktor yang

menentukan perkembangan suatu desa seperti kondisi geografis, sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam. Pembangunan desa dapat dilaksanakan melalui (1) perencanaan, penyiapan pembangunan desa berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa, (2) pelaksanaan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam desa, memanfaatkan swadaya masyarakat dan gotong royong. Kegiatan pembangunan desa dikoordinasikan oleh kepala desa dan dilaksanakan oleh perangkat desa dan sebagian masyarakat desa, (3) dalam pengawasan, masyarakat desa berhak mendapat informasi tentang rencana pembangunan desa dan pelaksanaannya serta menyampaikan berbagai pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa kepada pengurus desa dan badan perangkat desa.

## **2.9 Teori Perubahan Sosial**

Perubahan sosial adalah proses yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Pada saat yang sama, ruang lingkup perubahan sosial mencakup elemen budaya yang berwujud dan tidak terwujud. Ada proses perubahan yang bekerja sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak menyadarinya. Gerakan perubahan seperti itu disebut perkembangan. Proses perubahan berjalan paralel dengan masyarakat modern. Ini berbeda dengan teori evolusi perubahan sosial Comte. Titik tolak pemikiran Comte adalah pendapatnya tentang masyarakat berdasarkan konsep-konsep biologis yang dapat dirangkum, (Martindale dalam (Sihabudin, 2011).

Pendekatan ini menggunakan teori perubahan sosial yaitu perubahan sebagai fakta sosial yang terjadi sebagai hasil perencanaan untuk memajukan

dan meningkatkan kehidupan manusia. Perubahan yang dilakukan didasarkan pada tinjauan dan interpretasi yang cermat terhadap manfaat bagi kehidupan orang-orang tersebut. Cepat atau lambatnya perubahan akan ditentukan oleh kemampuan dan tingkat tanggungjawab dasar terhadap perubahan itu. Oleh karena itu, berdasarkan konsistensi program yang direncanakan dan keinginan masyarakat, entitas yang ingin berubah disebut sebagai “agen perubahan” bertindak sebagai pemimpin dalam mengelola perubahan dan bertanggung jawab untuk memantau perubahan.

Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial disebabkan oleh perubahan organisasi sosial, perkembangan sosial dan sistem kerja. (Betrand, 1980) menyatakan bahwa perubahan sosial pada dasarnya tidak dapat dijelaskan dan bersifat unifaktorial. Definsi teori perubahan sosial mencakup beberapa pokok bahasan penting antara lain proses dan mekanisme perubahan, ukuran perubahan sosial dan kondisi pelaku perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan pranatan sosial, (Anwar, 2014).

Perubahan adalah keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan dapat berupa kemajuan atau kegagalan. Perubahan dalam suatu kemajuan adalah perubahan yang memberi dan membawa kemajuan bagi masyarakat. Hal ini sangat diinginkan karena kemajuan dapat memberikan dampak positif dan berbagai manfaat bagi masyarakat. Pada saat yang sama, perubahan sebagai kegagalan adalah perubahan yang tujuannya untuk melanjutkan sesuai rencana. Jika perubahan itu tidak menguntungkan masyarakat maka perubahan itu dianggap gagal. Salah satu perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial adalah perubahan yang direncanakan.

Perubahan sosial dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan sosial, yaitu budaya, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain. Jadi perubahan sosial adalah teknik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan sosial terencana dan tujuannya adalah proses perencanaan untuk mengubah sikap dan perilaku atau kelompok yang digunakan sebagai tujuan perubahan dan dilaksanakan oleh “agen perubahan” dengan gagasan atau inovasi baru dalam sistem sosial untuk mencapai tujuan.

Jenis perubahan ini terjadi diluar kehendak masyarakat dan dapat menimbulkan efek sosial yang tidak terduga. Perubahan sosial disebabkan oleh pemberontakan atau revolusi sehingga dapat memicu perubahan besar. Sebuah revolusi dalam masyarakat mengubah prosedur untuk semua institusi sosial dikarenakan adanya kebijakan atau gagasan tersebut.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip pelaksanaan pembangunan desa dengan prinsip pembangunan masyarakat yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab serta proses pemanfaatan potensi desa seperti masyarakat dan potensi sosial yang meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Jika perubahan sosial dilakukan dengan benar maka akan berdampak positif bagi perkembangan.

Perubahan sosial dalam masyarakat mendorong sistem sosial yang terdiri dari nilai-nilai, sikap dan perilaku kelompok sosial. Program dana desa merupakan program nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial masyarakat desa agar masyarakat dapat menjadi ujung tombak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena peneliti ingin memahami, menggambarkan atau menjelaskan fenomena dan gejala yang terjadi selama pengelolaan sumber daya desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang berbeda atau fenomena yang berbeda dari realitas sosial dalam masyarakat yang menjadi subjek penelitian, meringkas dan mengatributkan realitas superfisial sebagai ciri, esensi, karakter, pola, tanda atau penggambaran kondisi tertentu situasi atau fenomena, (Bungin, 2007). Alasan menggunakan metode deskriptif adalah ingin menggambarkan kondisi yang diamati dilapangan secara lebih mendalam.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Peneliti memilih tempat di desa Air Pinang yang terletak di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simelue sebagai tempat penelitian. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Desa Air Pinang merupakan salah-satu desa yang sedang melakukan suatu proses pengelolaan dana desa.

### **3.3 Sumber Data**

Peneliti menggunakan hasil data dan informasi untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasan dari data tersebut.

1. Data Primer, adalah objek yang diambil dan dikumpulkan untuk digunakan dilapangan pada saat melakukan penelitian dengan cara turun lapangan ke lokasi tujuan.
2. Data Sekunder, adalah teknik pengumpulan informasi dicari terlebih dahulu dan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, terbitan pemerintah dan website atau sumber pendukung lainnya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode yang detail untuk mendapatkan data:

1. Wawancara adalah salah satu tugas pengumpulan data subjek penelitian berupa wawancara, tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan informan.
2. Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang peneliti peroleh melalui pengamatan dan hubungan langsung dengan lokasi yang diteliti. Teknik ini menggunakan pengamatan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung tentang subjek yang diteliti.
3. Dokumentasi adalah cara penyediaan informasi yang tersimpan dalam bahan seperti kamera, alat perekam, laporan, surat atau dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat.

### 3.5 Teknik Penentuan Informan

Informan atau narasumber adalah orang yang mengetahui dan memberikan informasi secara jelas kepada peneliti. Narasumber juga merupakan seseorang yang memiliki kemampuan pengetahuan berkaitan dengan tema yang sedang dibahas melalui teknik wawancara atau tanya jawab.

Informan utama dalam penelitian yaitu informan memiliki informasi mengenai objek penelitian yang dimana wawancara langsung disebut sebagai narasumber.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 1 Penentuan Informan

No	Nama-Nama Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Tokoh Masyarakat	4
3	Masyarakat	8
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

### 3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri melalui pengamatan, tanya jawab, mendengarkan, bertanya dan mencari data penelitian. Jadi peneliti harus mendapatkan alat bukti atau kebenaran tentang pemahaman penelitian kualitatif siap melaksanakan pengkajian dan turun lapangan. Kebenaran terhadap peneliti sebagai instrumen mampu mencakupi pembenaran tentang pengetahuan fenomena alam maupun sosial yang diamati untuk mendalami objek penelitian.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan mencakup 3 fungsi, yaitu:

1. Redukasi Informasi yaitu penelitian suatu bentuk analisis yang mengkategorikan, mengarahkan, membuang yang berlebihan dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diverifikasi.
2. Penyajian Informasi adalah suatu fungsi pada saat melaporkan hasil pengamatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga informasi yang terkumpul dapat dipahami dan dipelajari sesuai objek yang diinginkan.
3. Kalkulasi dan Verifikasi data yaitu peneliti merumuskan prinsip pikiran. Dalam penyusunan laporan penelitian digunakan landasan teori berdasarkan fakta dilapangan untuk menilai kebenarannya kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat dibuktikan kebenarannya sesuai dengan hipotesis.

### **3.8 Uji Kredibilitas Data**

Tringulasi, yaitu metode verifikasi data yang digunakan dalam ketidaktahuan untuk memverifikasi atau membandingkan data. Tringulasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Tringulasi Data, dengan menggunakan sumber data yang berbeda seperti hasil wawancara, hasil observasi, dokumen atau bertanya kepada beberapa orang yang berbeda pengetahuan
2. Tringulasi Pengamatan, adanya pengamatan diluar penelitian yang mendukung hasil penggabungan informasi. Dalam penelitian ini dosen

bimbingan bertindak sebagai pengamatan yang memberikan petunjuk tentang hasil informasi yang dikumpulkan.

3. **Tringulasi Teori**, yaitu untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan. Dalam penelitian ini, berbagai teori tentang penggunaan dan penguji data yang dikumpulkan, dimasukkan dalam data tersebut.

### 3.9 Jadwal Penelitian

Jadwal dan kegiatan untuk melaksanakan penelitian ini mulai dari konsultasi judul, pembuatan proposal, seminar proposal, penelitian, seminar hasil hingga ujian akhir. Berikut adalah tabel jadwal dan urutan pelaksanaan penelitian.

Tabel 2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian					
		7	8	8	2	11	11
1	Pengajuan Judul						
2	Pembuatan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Penelitian						
5	Seminar Hasil						
6	Sidang						

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian, penulis dapat mengetahui kondisi lingkungan yang diteliti merupakan hal penting. Perlu diketahui oleh peneliti agar peneliti dan pembaca mengetahui bagaimana mendapatkan gambaran tentang daerah penelitian. Lokasi penelitian berada di desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

Wilayah Simeulue merupakan salah satu wilayah administratif Aceh di Indonesia yang terletak kurang lebih 150 km dari pantai Barat Aceh. Kabupaten Simeulue memiliki semboyan (Simeulue Ate Fulawan) adalah salah satu Ibu Kota Provinsi Aceh Sinabang. Berdasarkan informasi, luas wilayah Kabupaten Simeulue adalah 2.310 km<sup>2</sup> dan terletak diantara “0202’03’-03002’04” LU dan “95022’15-96042’45” BT serta merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari ± 57 pulau besar dan kecil. Pulau Simeulue memiliki panjang ± 100,2 km dan lebar 8-28 km dengan luas 212.512 ha.

Desa Air Pinang merupakan salah-satu dari 17 desa yang ada di wilayah Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Secara geografis desa Air Pinang berada pada posisi koordinat 2°35’6.00.“N dan 96°14’24.00”E yang jarak dengan pusat Kecamatan Simeulue Timur ±25 km dengan luas wilayah sekitar 33,73 km<sup>2</sup> yang berjarak kurang lebih 23 km sebelah Timur wilayah Kecamatan Simeulue Timur terdiri dari desa Air Pinang

sebanyak 5 (lima) desa. Berikut nama-nama desa yang ada di desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue:

Tabel 3 Daftar Nama Dusun di Desa Air Pinang

No	Jumlah Dusun Di Desa Air Pinang Kcamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
1	Dusun Air Manis
2	Dusun Karya Jaya
3	Dusun Pinang Jaya
4	Dusun Blang Padang
5	Dusun Karya Baru

*Sumber Data: Profil Desa Air Pinang Tahun 2021*

Luas desa Air Pinang adalah 3.300 ha dengan jumlah penduduk 1.316 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 400 dengan batas wilayah sebagai berikut:

#### 4.1.1 Kondisi Demografi

Desa Air Pinang terdiri dari 5 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 1.289 jiwa merupakan salah-satu dari 17 desa di Kecamatan Simeulue Timur. Batas wilayah desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur sebagai berikut:

Table 4 Batas Wilayah Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabuapten Simeulue

Batas Wilayah Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabuapten Simeulue	
Sebelah Utara	Berbatasan dengan laut
Sebelah Timur	Berbatasan dengan desa Ujung Tinggi
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Hutan Negara
Sebelah Barat	Berbatasan dengan desa Kuala Baru

*Sumber Data: Profil Desa Air Pinang Tahun 2021*

#### 4.1.2 Pembagian Wilayah Desa

Pembagian desa Air Pinang yang memiliki luas 3300 ha. Desa Air Pinang terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu dusun Air Manis, Karya Baru, Karya

Jaya, Pinang Jaya, Blang Padang. Menurut jenis jabatan desa Air Pinang, perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Perencanaan, Tata Usaha dan Umum, Kasih Pemerintah, Kasih Kesejahteraan, Kasih Pelayanan dari 5 (lima) dusun.

#### **4.1.3 Deskripsi Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Air Pinang**

Kekayaan sumber daya alam desa Air Pinang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Pendapatan desa merupakan total pendapatan desa yang tercatat dalam APDes setiap tahun anggaran. Menurut peraturan desa Air Pinang Nomor 5 Tahun 2015 sumber pendapatan desa meliputi:

1. Pembagian dana desa, pendapatan asli desa yang terdiri dari kekayaan desa dan pendapatan asli desa lainnya yang sah, bagian pajak Kabupaten paling sedikit 10% dari dana desa, dan sebagian dicadangkan untuk desa yaitu pembagian untuk setiap desa bagian proposional dari dana perimbangan ekonomi pusat dan daerah yang diterima desa di kabupaten sekurang-kurangnya 10% dari bagian proporsional setiap desa, dukungan keuangan dana desa, Negara, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.
2. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dikelola oleh kas desa.
3. Negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak boleh mengambil alih sumber-sumber pendapatan desa yang sudah dimiliki

dan dikelola oleh desa. Kekayaan desa terdiri dari tanah desa, bangunan yang dikelola desa, properti desa dan lainnya.

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa Air Pinang adalah petani dan nelayan. Mayoritasnya beragama Islam dan mengikuti adat tradisi masyarakat. Pembangunan masyarakat desa harus mandiri dan pembangunan tersebut membawa perubahan sosial, ekonomi, budaya yang seimbang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Tabel 5 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	259
2	Pedagang/Wiraswasta	50
3	Pegawai Negeri	20
4	TNI/POLRI	5
5	Pensiunan	1
6	Peternak	20
7	Pengrajin	5
8	Jasa	10
9	Tukang	20
10	Pekerja Seni	25
11	Lain-Lain	257
12	Tidak Bekerja/Pengangguran	305
<b>Jumlah</b>		<b>997</b>

*Sumber Data: Profil Desa Air Pinang Tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling mendominasi di desa Air Pinang tersebut adalah tidak bekerja/pengangguran yang berjumlah 305 orang kemudian diikuti oleh Petani, Pedagang/Wiraswasta, Pekerja Seni, Pegawai Negeri, Tukang, Peternak, Jasa, Pengrajin TNI Porli, Pensiun.

#### 4.1.4 Kesejahteraan Warga

Tabel 6 Data Kesejahteraan Warga

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk sangat miskin	70 KK
2	Jumlah penduduk miskin	300 KK
3	Jumlah penduduk sejahtera	30 KK
<b>Jumlah</b>		<b>400 KK</b>

*Sumber Data: Profil Desa Air Pinang Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk sangat miskin di desa Air Pinang berjumlah 70 KK, jumlah penduduk miskin berjumlah 300 KK dan jumlah penduduk sejahtera berjumlah 300 KK.

#### 4.1.5 Deskripsi Keadaan Sosial Masyarakat Desa Air Pinang

Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Air Pinang pada umumnya dibidang pertanian, perkebunan dan nelayan. Masalah yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk sering kali terbatasnya kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk menurut Rencana Pembangunan Daerah Simeulue. Hal lain harus diperhatikan dalam pembangunan desa adalah upaya perluasan kesempatan kerja dengan memperkuat permodalan dan memfasilitasi sebagai modal pengembangan usaha khususnya dalam ekonomi produktif.

Tingginya angka kemiskinan desa Air Pinang memaksa desa Air Pinang untuk mencari usaha lain yang dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Secara umum kegiatan organisasi masyarakat di desa Air Pinang seperti LPMD, PKK, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Dharma Wanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok Tani, Kelompok Peternakan dan

Kelompok Nelayan merupakan kegiatan desa sebagai media dalam setiap proses pembangunan desa dalam masyarakat.

#### 4.1.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa berjalan dengan lancar apabila tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi. Akses pendidikan baik tingkat dasar maupun menengah dekat dengan pemukiman penduduk, namun menurut data statistik rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan masalah yang harus segera diatasi terutama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Demografi menurut tingkat pendidikan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Taman Kanak-Kanak	42 Jiwa
2	SD	136 Jiwa
3	SLTP	120 Jiwa
4	SLTA/SMK	21 Jiwa
5	Akademi/D1-D3	14 Jiwa
6	Sarjana S1	15 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>339 Jiwa</b>

*Sumber Data : Profil Desa Air Pinang Tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Air Pinang yang pendidikannya tamatan TK (Taman Kanak-Kanak) berjumlah 42 jiwa, tamat SD berjumlah 132 jiwa, tamat SLTP 120 jiwa, tamat SLTA/SMK 21 jiwa, tamat Akademi/D1-D3 15 jiwa dan Sarjana S1 berjumlah 15 jiwa. Kesadaran masyarakat desa Air Pinang terhadap pentingnya pendidikan masih sangat minim.

#### 4.1.7 Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Umum

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan fase keberlanjutan yang diawali dengan proses penyiapan masyarakat untuk mengelola sendiri program pembangunan. Proses persiapan ini memerlukan partisipasi masyarakat agar dapat mengambil keputusan pembangunan yang sehat dan adil serta semakin sadar akan hak dan tanggungjawab dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri serta mengakses berbagai sumber daya yang mungkin tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan.

Tabel 8 Data Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Umum

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah	Prasarana Pendidikan	Jumlah	Prasaran Umum Lainnya	Jumlah
1	Posyandu	2 Unit	Taman Kanak Kanak	1 Unit	Tempat Ibadah	5 Unit
2	Pustu	2 Unit	SLB	-Unit	Lapangan Olahraga	4 Unit
3	Bidan Desa	2 Orang	SD/MI	1 Unit		
4			SLTP/MTs	1 Unit		
5			SLTA/MA	- Unit		
6			TPA/TPQ	1 Unit		

*Sumber Data : Profil Desa Air Pinang Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa desa Air Pinang memiliki fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yaitu Posyandu 2 unit, Pustu 2 unit dan Bidan Desa 2 orang dan prasarana pendidikan yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) 1 unit, SLB, SD/MI 1unit, SLTP/MTs 1 unit, SLTA/MA, TPA/TPQ 1 unit. Sedangkan prasarana umum lainnya yaitu tempat ibadah (Masjid) 5 unit dan lapangan olahraga 4 unit.

#### 4.1.8 Karakteristik Informan

Dalam karakteristik informan akan di klarifikasi berdasarkan jenis kelamin, yaitu sebagai berikut:

Table 9 Data Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	7
2	Perempuan	6
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

*Sumber: Survei Penelitian 2022*

Data jumlah informan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang dan perempuan sebanyak 6 (enam) orang dengan jumlah total informan sebanyak 13 (tiga belas) orang.

#### 4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Setelah melakukan studi lapangan dengan mewawancarai beberapa narasumber, banyak informasi yang terkumpul tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Sosial Ekonomi (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue), informasi ini memberikan gambaran tentang pengelolaan dana desa yang utamanya untuk memajukan desa dengan menggunakan pengelolaan dana desa secara efektif untuk memajukan desa, serta kesejahteraan masyarakat desa, kemudian dibahas secara ilmiah pada hasil penelitian.

Berikut beberapa tanggapan informan mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Sosial

Ekonomi (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue) oleh Bapak Manja selaku Kepala Desa Air Pinang, dimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Jumlah dana desa ditahun 2018 sebanyak 1.523.229.00 sedangkan jumlah dana desa ditahun 2019 sebanyak 1.148.229.00 dan dana desa yang diterima tahun 2020 berjumlah 582.886.068.00 kalau tahun 2021 ini berjumlah 369.515.080.00 dan tahun 2022 dana desa yang diterima berjumlah 285.057.881.00 karena yang tahun ini ada sekitar pengurangan atau pemotongan dari pusat. Jadi tahun 2022 ini bukan malah bertambah malah makin berkurang” (Wawancara, Juni 2022).

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Jaswin selaku Bendahara Desa Air Pinang .

“Jumlah dana desa Air Pinang tahun 2018 sebanyak 1.523.229.00 sedangkan jumlah dana desa tahun 2019 sebanyak 1.148.229.00, di tahun 2020 sebanyak 582.886.068.00 dan tahun sekarang 2021 sebanyak 369.515.080.00 dan tahun 2022 sebanyak 285.057.881.00 dimana mengalami penurunan yang lumayan besar” (Wawancara, Juni 2022).

Hal yang sama dijelaskan oleh Ibu Ati Marnis selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Kalau masalah keuangan jumlah dana desa itu yang saya tahu 2018 sebanyak 1.523.229.00 dan tahun 2019 sebanyak 1.148.229.00 dan tahun berikutnya saya tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi tahun 2018 itu lebih besar jumlahnya daripada tahun-tahun berikutnya, mungkin karena banyak pembangunan-pembangunan yang belum didirikan, setelah adanya pembangunan yang berdiri dana desa makin lama makin berkurang karena kebutuhan dalam desa sudah ada yang terpenuhi” (Wawancara Juni, 2022).

Berdasarkan pendapat informan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana desa tahun 2018 lebih besar jumlahnya dari pada tahun berikutnya.

Adapun tanggapan informan mengenai Pengelolaan Dana Desa Air Pinang oleh Bapak Manja selaku Kepala Desa Air Pinang.

“Jika dipertanyakan bagaimana dari bentuk sistem pengelolaan dana desa, kami disini menggunakan sistem perencanaan yaitu dibuat sesuai

dengan hasil rapat kerja usulan masyarakat dan untuk kebutuhan desa adanya penyusunan perencanaan gaji aparat desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa yaitu untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan parit, pembuatan irigasi dan jembatan. Selanjutnya ada pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua itu harus sesuai dengan ketentuan musyawarah bersama yaitu sebelum adanya dana desa yang diberikan ke desa, kami selaku aparat desa harus membuat perencanaan lebih awal sehingga saat dana desa sudah masuk maka kami sudah tahu berapa dana yang diperlukan untuk pembangunan-pembangunan yang ada di desa” (Wawancara Juni, 2022).

Hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Surianto selaku Kepala Urusan Keuangan tentang sistem pengelolaan dana desa dan persen untuk infrastruktur.

“Kalau untuk sistem pengelolaan dana desa adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan tergantung dari seberapa besar dananya, disesuaikan juga dengan kebutuhan dalam desa agar bisa diperhitungkan dan mencukupi untuk infrastruktur sekian persen dan untuk pemberdayaan sekian persen” (Wawancara Juni, 2022).

Selanjutnya Bapak Jaswin selaku Bendahara Desa juga menyatakan tentang sistem pengelolaan dana desa.

“Kalau sistem pengelolaan dana desa disini yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk pelaksanaan, seluruh pendapatan dan pengeluaran dana desa dalam rangka melaksanakan wewenang desa dilaksanakan itu melalui rekening kas desa, sistem pengelolaan dan persen untuk infrastruktur tidak ada pembagian untuk infrastruktur berapa, dan pemberdayaan berapa, tergantung dari keadaan, jadi tidak ada persentasenya. Kalau yang tahun ini untuk pemberdayaan disebut ketahanan pangan cuma 20% dalam bidang pertanian ataupun bidang lainnya karena disesuaikan dengan kondisi dikampung saja” (Wawancara Juni, 2022).

Berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana desa Air Pinang dilakukan dengan sistem perencanaan yaitu dalam rangka membangun desa harus diawali

dengan proses perencanaan. Selanjutnya sistem pelaksanaan yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun dalam perencanaan sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada sistem pelaporan yaitu kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan harus dilakukan secara disiplin dan yang terakhir ada sistem pertanggungjawaban yaitu tidak hanya disampaikan ke atas, tetapi juga harus tersampaikan oleh masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal tersebut tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Disisi lainnya perencanaan dalam mengelola dana desa Air Pinang yang sudah di proses seperti musyawarah desa, beberapa keputusan kepala desa dan aparat desa lainnya yang disatukan sebaik mungkin dalam qanun desa.

Adapun tanggapan informan mengenai pengelolaan dana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Air Pinang oleh Bapak Manja selaku Kepala Desa.

“Kegiatan yang sudah disusun untuk mencapai kondisi sejahtera dari dana desa yaitu sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan utama masyarakat desa yaitu pembangunan infrastruktur untuk membantu kegiatan masalah ekonomi, persoalan rusaknya masalah lingkungan atau rendahnya sumber daya alam yang ada di desa itu sendiri. Pengelolaan dana desa tidak di dominasi sendiri oleh aparatur desa, selanjutnya terdapat beberapa kepentingan yang ikut serta yaitu masyarakat desa dengan mengadakan kegiatan LPMD, kegiatan pembinaan PKK, Karang Taruna. Sedangkan Karang Taruna dan tim PKK mempunyai fungsi yaitu membuat kumpulan kegiatan program yang sudah disetujui dan dilakukan program-program pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur. Untuk tim PKK dari dana desa digunakan untuk program simpan pinjam yang tujuannya untuk meningkatkan daya beli dan ekonomi keluarga. Dalam melaksanakan program ini, masyarakat diarahkan untuk aktif, karena semua anggota masyarakat tentunya harus mendapatkan untung dari program dana desa ini. Terlibatnya kepentingan dari masyarakat yang kurang mampu atau miskin dalam pelaksanaan dana desa harus dilibatkan agar seluruh

masyarakat desa Air Pinang tahu tentang adanya program dana desa. Sementara itu dalam bidang pemberdayaan, dana desa digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan dana desa juga ditujukan untuk program-program yang mempunyai pengaruh untuk menumbuhkan kesanggupan masyarakat di bidang ekonomi yaitu mengembangkan wirausaha, meningkatkan pendapatan penduduk melalui BUMDes. Kalau untuk bidang pendidikan dari dana desa yaitu dengan memberikan bantuan, menyediakan ruang belajar bagi anak-anak yang ada di desa itu” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan juga oleh Bapak Sulman selaku

Kepala Urusan Perencanaan.

“Kalau menurut saya program kebijakan desa yang sudah tersusun dari hasil musyawarah dengan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dana desa digunakan untuk pembangunan sarana fisik yaitu jalan, jembatan, perbaikan saluran irigasi, paret. Kegiatan ini dibuat untuk akses desa Air Pinang dengan lingkungan yang ada disekelilingnya menjadi terbuka agar masyarakat mudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Kondisi ini sudah jelas lebih baik setelah adanya dana desa dibandingkan dengan sebelumnya. Pemanfaatan dana desa melalui pembangunan infrastruktur secara tidak langsung hasilnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan sementara bagi masyarakat sebagai pekerja pada saat pembangunan jalan. Sedangkan dampak dari adanya fasilitas umum terhadap perubahan ekonomi itu terdapat perbaikan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan tersedianya fasilitas umum. Namun, dampaknya masih relatif sedang dan perlu ada peningkatan untuk dapat merasakan seutuhnya. Sebagai contoh yang belum ada, di desa Air Pinang ini belum adanya pasar desa yang dapat membantu masyarakat untuk menjual hasil pertanian dengan lebih mudah dan banyak untuk pengeluaran biaya hidup menurun dan pendapatannya meningkat dengan adanya pemasaran yang banyak karena mayoritas penduduk disini bekerja sebagai petani” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama disampaikan juga oleh Bapak Suriyanto selaku Kepala

Urusan Keuangan Desa Air Pinang.

“Kalau menurut saya program kebijakan dana desa yang sudah dirancang dan sudah terbukti yaitu adanya pembangunan infrastruktur. Bisa dikatakan disini dengan adanya pembangunan fisik, masyarakat yang kurang mampu perlu ditingkatkan pendapatan dalam pemanfaatan ekonomi dari pembangunan infrastruktur. Salah satunya yaitu masyarakat desa Air Pinang menggunakan dana desa untuk pembangunan fisik yaitu pembuatan saluran irigasi untuk masyarakat

petani gunanya mengalirkan air dari sumber lahan tani” (Wawancara Juni, 2022).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak penggunaan dana desa di desa Air Pinang terlihat pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih kurang. Kondisi kehidupan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial baru saja dimulai dengan penyelenggaraan pembangunan desa dan pembangunan beberapa akses jalan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

Adapun tanggapan informan mengenai dana desa untuk pendidikan desa Air Pinang oleh Bapak Manja selaku Kepala Desa Air Pinang.

“Kalau dana desa digunakan untuk bidang pendidikan itu ada tapi tidak banyak yang dipergunakan. Digunakan dana desa itu untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dana desa itu diberikan untuk membiayai operasional PAUD yang jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan yang dikasih atau yang diajukan. Peningkatan mutu pendidikan di desa Air Pinang ini masih belum terlaksana secara keseluruhan karena upaya yang dilaksanakan hanya untuk mendorong kegiatan belajar mengajar di PAUD itu” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sulman selaku Kepala Urusan Perencanaan.

“Peningkatan mutu pendidikan yang di danai dari dana desa itu ada tapi tidak seberapa dan dilakukan hanya untuk bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, karena yang paling besarnya itu digunakan untuk pembangunan fisik” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ati Marnis selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Air Pinang.

“Pemanfaatan dana desa itu adalah wewenang khusus yang diberikan untuk desa gunanya untuk pembangunan desa dengan prioritas sesuai kebutuhan dalam desa. Berkaitan dengan pemanfaatan desa untuk bidang pendidikan ada yang dilaksanakan yaitu hanya untuk biaya operasional pendidikan. Walaupun belum maksimal dan belum telalu banyak yang diadakan program-program untuk pendidikan karena pada

dasarnya dana desa itu di prioritaskan untuk pembangunan desa seperti program pembangunan infrastruktur, pembangunan pemberdayaan dan lainnya” (Wawancara Juni, 2022).

Adapun beberapa penjelasan dari informan diatas dalam des Air Pinang, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan mutu pendidikan di desa Air Pinang belum efektif. Pemerintah desa mempunyai wewenang untuk mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dana desa lebih di prioritaskan untuk bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Untuk bidang pendidikan digunakan hanya untuk biaya operasional PAUD dan kebutuhan biaya operasional dibantu oleh dana desa.

Adapun tanggapan informan mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat sejak digelontarkannya dana desa oleh Bapak Manja selaku Kepala Desa Air Pinang.

“Menurut saya untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sejak digelontarkannya dana dirasakan sangat membantu. Peralnya wujud terkecil dari pengelolaan dana desa adalah sudah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa walaupun tidak seberapa. Dengan adanya dana desa juga dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur gunanya sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang bersifat umum dimana infrastruktur berfungsi untuk mempermudah lancarnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat seperti pendistribusian barang dan jasa” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sulman selaku Kepala Urusan Perencanaan desa Air Pinang.

“Keberhasilan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat disini sudah ada karena pelaksanaan pengelolaan dana desa itu dalam memajukan kesejahteraan masyarakat disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tindakannya sudah terwujud walaupun belum optimal dengan baik karena untuk kedepannya masih direncanakan agar lebih baik lagi. Walaupun masih ada beberapa

program yang belum terselesaikan dan harus menunggu anggaran dana tahun depan. Karena pada dasarnya pengelolaan ini lebih besar di prioritaskan untuk infrastruktur, ketika sudah terpenuhi pembangunan fisiknya, setelah adanya dana desa lagi baru digunakan untuk yang lain” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Jaswin selaku Bendahara Desa Air Pinang.

“Penjelasan saya tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat sejak digelontarkannya dana desa sudah ada walaupun masih ada sedikit kelemahan di beberapa bidang yang belum di proses karena menunggu dana desa tahun depan Insha Allah baru bisa dibangun kegiatan-kegiatan yang belum terwujud karena ini masih dalam tahap perencanaan kami aparat desa” (Wawancara Juni, 2022).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat sejak digelontarkannya dana desa masih belum efektif hal ini dapat dibuktikan dengan masih kurangnya pemberdayaan masyarakat. Meskipun belum tercapainya namun masyarakat menyadari bahwa pemerintah desa memprioritaskan dana desa untuk pembangunan fisik sesuai dengan musyawarah desa.

Adapun tanggapan dari beberapa informan mengenai tentang tepatnya sasaran dana desa atau belumnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh Bapak Manja selaku Kepala Desa Air Pinang.

“Berkaitan dengan sudah tepat sasaran atau belumnya peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Air Pinang yang di danai oleh program dana desa fokusnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan. Kalau di bidang pendidikan kesejahteraannya belum terjamin efektif karena di bidang pemberdayaannya saja masih kurang. Selain program BUMDes untuk bidang pemberdayaan, adanya program UMKM dan program ini masih menjadi pertimbangan bentuk pemberdayaannya. Sebenarnya pemberdayaan UMKM ini harus sesuai dengan landasan pemahaman

kapasitas daerah sehingga bisa memberikan kebutuhan yang sesuai. Selain di bidang pemberdayaan ekonomi, salah satu pemberdayaan masyarakat butuhkan yaitu di bidang kesehatan karena masyarakat perkampungan atau pedesaan, selain masih terbatas akses sarana kesehatan, tidak sedikit kurangnya kesadaran untuk memperhatikan masalah kesehatan” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suriyanto selaku Kepala Urusan Perencanaan.

“Menurut saya sendiri tentang tepat sasaran atau belumnya peningkatkan kesejahteraan masyarakat itu masih kurang tepat karena masih banyak yang belum terelesiasikan, dana desa itu lebih banyaknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur sehingga pembangunan pemberdayaan terbatas keuangannya” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ati Marnis selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Pada dasarnya tentang dana desa agar tepat sasaran yang digunakan untuk tingkat kesejahteraan masih banyak yang belum optimal terlebihnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Sebelum adanya dana desa di desa ini pembangunan infrastruktur jalan masih sangat buruk dan setelah adanya dana desa terlebih dahulu digunakan untuk pembuatan jalan makanya pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang” (Wawancara Juni, 2022).

Dari beberapa tanggapan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi pembangunan infrastruktur sudah memadai karena dana desa lebih besar digunakan untuk bidang pembangunan fisik. Sedangkan di pembangunan pemberdayaan masyarakat masih belum memadai karena kurangnya dana untuk pemberdayaan masyarakat desa Air Pinang.

Adapun tanggapan informan mengenai indikator kesejahteraan masyarakat di desa Air Pinang oleh bapak Manja selaku kepalat desa Air Pinang.

“Adapun indikator kesejahteraan masyarakat di desa Air Pinang dapat diukur dari tingkat pendapatan keluarganya, kondisi rumah dan fasilitas

yang dimiliki keluarga, tingkat pendidikan dan kesejahteraannya. Dengan program dan kebutuhan indikator kesejahteraan masyarakat ini digunakan untuk mengetahui bagaimana program dan kebijakan desa yang dikelola agar sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Jaswin selaku Bendahara Desa.

“Indikator kesejahteraan masyarakat di desa Air Pinang dapat dilihat dari beberapa tingkat hasil pendapatan masyarakat, kualitas hidup dari segi fisik yaitu kesehatan, pendidikan dan keadaan lingkungannya. Dilihat juga dari kondisi rumah dan fasilitas yang dimiliki dalam keluarga.” (Wawancara Juni, 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Jasman selaku Kaur Desa masyarakat desa Air Pinang.

“Kalau indikator kesejahteraan masyarakat disini dapat kita lihat secara langsung dari bagaimana keadaan tempat tinggalnya dan fasilitas yang ada dalam rumahnya, pendapatannya lebih tinggi atau pengeluaran hidupnya lebih banyak, pendidikannya bagaimana dan kondisi kesehatannya bagaimana” (Wawancara Juni, 2022).

Adapun penjelasan dari beberapa informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan tersebut gunanya untuk mengukur penggunaan dana desa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tanggapan informan mengenai kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dari pengelolaan dana desa Air Pinang oleh Bapak Kamisdin selaku Masyarakat desa Air Pinang.

“Kalau disini pendapatan masyarakat desa Air Pinang bekerja sebagai usaha tani untuk meningkatkan perekonomian dan usaha-usaha lainnya yang kami lakukan dalam menghasilkan tunjangan pendapatan tiap hari. Peningkatan pendapatan kami masyarakat merupakan kemampuan yang kami miliki melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk terpenuhnya kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan sosial, kebutuhan dasar ataupun kebutuhan lainnya. Jadi upaya bagi kami masyarakat dalam meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan yang harus dilakukan yaitu adanya bantuan simpan pinjam untuk masyarakat pedesaan yaitu bantuan simpan pinjam ini diajukan untuk kegiatan usaha baik dalam mengembangkan usaha maupun pembukaan usaha

yang baru, selanjutnya adanya pengembangan motivasi kerja dalam usaha pelatihan, ini sangat penting dalam pelatihan keterampilan untuk usaha ekonomi yaitu mendorong kami masyarakat dalam melakukan pekerjaan yang dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Peningkatan motivasi gunanya untuk menjalankan pekerjaan atau usaha dalam memanfaatkan sumber daya serta kemampuan sarana yang dimiliki dan terakhir ada kegiatan pelatihan keterampilan dalam mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha. Program pelatihan ini gunanya untuk pengetahuan masyarakat dalam mengelola dan menjalankan usaha meningkatnya kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam menjalankan usaha masyarakat” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yusran selaku masyarakat desa Air Pinang.

“Untuk pendapatan masyarakat dari dana desa yang sudah dijalankan yaitu usaha simpan pinjam yang kami terima langsung dan digunakan untuk pengembangan usaha. Kalau yang lainnya seperti pengembangan motivasi belajar dan pelatihan keterampilan yang tujuannya untuk kegiatan penguatan modal usaha yang digunakan dalam pengembangan usaha” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh oleh Bapak Musliadi selaku masarakat desa Air Pinang.

“Menurut saya untuk mendapatkan pendapatan masyarakat dari dana desa itu adanya usaha simpan pinjam karena masyarakat disini tidak hanya bertani, tetapi ada juga pedagang, tukang, peternak dan lainnya. Tingkat pendapatan di desa ini masih sangat kurang, kebanyakan penduduk disini tidak bekerja/pengangguran makanya diterapkan usaha simpan pinjam untuk mendorong masyarakat dalam mendapatkan pendapatan. Selanjutnya ada diterapkan pengembangan motivasi belajar pelatihan keterampilan yaitu untuk penguatan usaha dalam bermodal” (Wawancara Juni, 2022).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh penggunaan dana desa di desa Air Pinang diatur secara sistematis. Kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu dan berhubungan langsung dengan peningkatan rutin. Masyarakat desa juga harus mampu melakukan apa yang

menjadi permasalahan masyarakat desa dan peluang ekonomi yang baik. Masyarakat yang kurang mampu harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan

Adapun tanggapan informan mengenai dampak dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di desa Air Pinang oleh Bapak Jasman selaku masyarakat desa Air Pinang, dimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Perlu diketahui bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu taraf hidup masyarakat yang sangat buruk, tingginya angka pengangguran atau kurangnya lapangan pekerjaan. Untuk mengurangi dampak kemiskinan seharusnya diperlukan program-program yang di dukung secara khusus sesuai pendapatan untuk meningkatnya keterampilan guna untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi. Hanya ada beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum efektif dan berdampak dalam menurunkan tingkat kemiskinan, karena yang paling banyak masyarakat disini pengangguran atau tidak bekerja hal ini terjadi karena desa tersebut tidak sedikit dalam mengalokasikan dana desa. Pemanfaatan dana desa sebaiknya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara dalam terhadap pengentasan kemiskinan” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Kamisdin selaku masyarakat desa Air Pinang.

“Kalau bagi saya kesejahteraan masyarakat desa Air Pinang ini masih sangat jauh tertinggal karena jumlah penduduk kurang mampu lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang berada atau sudah kaya. Mayoritas penduduk disini pengangguran dan sebagian bekerja sebagai petani. Adapun pendapatan dana desa yaitu digunakan untuk pembangunan fisik tetapi itu tidak berpengaruh terhadap kemiskinan karena penggunaan dana desa disini lebih banyaknya difokuskan untuk membenah pembangunan infrastruktur desa. Jadi pendapatan dari dana desa belum efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena program pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang. Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan dapat kita lihat bahwa dana desa memberikan pengaruh yang beragam disetiap dusun” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nuraini selaku masyarakat desa Air Pinang.

“Menurut saya di desa ini tingkat kemiskinan masih sangat banyak apalagi pengangguran tidak adanya lapangan pekerjaan masih sangat banyak. Penyebab terjadinya kemiskinan karena tidak meratanya penyaluran pendapatan dan tidak seimbangnya pembangunan. Dana desa masih belum berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan karena penggunaan dana desa itu lebih fokusnya kearah pembangunan fisik, sementara penggunaan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masih sangat kurang” (Wawancara Juni, 2022).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan salah-satu kinerja yang standar dalam pembangunan pemerintah yang dilihat dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat. Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat masih belum memadai terhadap penduduk kurang mampu atau miskin, hal ini terjadi karena pengelolaan dana desa yang sangat kecil jumlahnya untuk kegiatan pemberdayaan. Walaupun telah terbukti beberapa pembangunan, dana desa belum mampu berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan karena pengelolaan dana desa belum mampu meningkatkan pemberdayaan.

Hasil pengelolaan dana menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dari segi standar dan pengelolaannya, namun masih belum ada perhatian terhadap makna pemberdayaan yang sesungguhnya.

Adapun tanggapan informan mengenai dampak pengelolaan dana desa Air Pinang terhadap peningkatan ekonomi oleh Bapak Yusran selaku masyarakat desa Air Pinang, dimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Mengetahui tentang dampak program dana desa terhadap peningkatan ekonomi sebagian sudah berjalan dengan baik karena adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan masyarakat pertanian untuk akses pengangkutan hasil pertanian. Dengan adanya

dana desa, banyak pekerjaan yang dilakukan. Peningkatan untuk mempercepat program pembangunan membawa perubahan baik faktor utamanya untuk sumber daya manusia berupa tenaga kerja. Maksud dari tenaga kerja ini adalah pekerja yang melaksanakan kegiatan untuk proyek yang didanai bersumber dari dana desa baik tenaga kerja bayaran ataupun gotong royong dan pemberian modal usaha untuk masyarakat melalui BUMDes” (Wawanacara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Julisa selaku Masyarakat desa Air Pinang.

“Kalau bagi saya pendapatan dari adanya dana desa sudah terbukti walaupun tidak semuanya terpenuhi karena diakibatkan oleh ketidakpahaman tentang bagaimana cara pelaksanaan program yang disebabkan oleh lemahnya faktor sumber daya manusia” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nurimah selaku masyarakat desa Air Pinang.

“Bagi saya pendapatan ekonomi dari adanya dana desa itu sudah ada, seperti yang sudah dirasakan saat ini walaupun tidak seberapa karena pengelolaan dana desa disini digunakan untuk pembangunan fisik walaupun tidak banyak melalui BUMDes untuk pengelolannya karena dibidang pembangunan fisik hanya memberikan pendapatan kecil” (Wawancara Juni, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Saidam selaku masyarakat desa Air Pinang.

“Pengelolaan dana desa disini masih menjadi keunggulan pemerintah desa, oleh karena itu hasil pembangunan fisik yang dibangun belum mampu mendongkrak pendapatan masyarakat” (Wawancara Juni, 2022).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya dalam pengelolaan dana desa digunakan untuk program pembangunan fisik minimal jumlahnya dikurangi dan disalurkan untuk program pemberdayaan masyarakat karena peran BUMDes dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Sosial Ekonomi**

Secara umum dana desa merupakan dana untuk membiayai kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pendapatan, mengentaskan kemiskinan serta membiayai pembangunan dan pemberdayaan pembangunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Dalam bentuk sistem pengelolaan dana desa digunakan sistem perencanaan yang diusulkan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil rapat kerja dan diikuti dengan sistem pengawasan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Semua sistem yang dilakukan sesuai dengan ketentuan musyawarah. Penggunaan dana desa di bidang pembangunan sudah efektif tetapi tidak dengan pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa masih belum tepat atau belum efektif. Hal tersebut dengan melaksanakan pembangunan fisik saja tidak cukup untuk merasakan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan lagi untuk mengimbangi pelaksanaan pembangunan pemerintah.

Oleh karena itu, perluasan infrastruktur saja tidak cukup. Harus siap dengan keinginan pemerintah desa untuk menggunakan fasilitas infrastruktur yang ada. Maka dari itu diperlukan penguatan keterampilan Kepala Desa dan pendamping desa untuk mendukung pengelolaan dana desa secara lebih terarah

dan efektif sehingga dana desa tidak hanya terfokus pada bidang pembangunan fisik, tetapi lebih banyak digunakan untuk masyarakat. Pemberdayaan khususnya dalam pembentukan BUMDes dan UMKM yang dapat meningkatkan perekonomian.

Dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat rendah dan belum memadai. Hal ini terjadi karena dana desa lebih besar di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dari pada pemberdayaan masyarakat sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat dari dana desa juga belum efektif. Pengelolaan dana desa masih di dominasi oleh pemerintah, oleh karena itu pembangunan fisik belum mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat desa masih sangat dibutuhkan karena dengan adanya program pemberdayaan masyarakat dimotivasi oleh dorongan masyarakat untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja secara mandiri. Peran BUMDes dan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat masih sangat kecil. Selain itu, pembangunan fisik tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, setidaknya dalam pembangunan fisik dikurangi jumlahnya dikurangi dan disalurkan ke dalam program-program pemberdayaan.

Jika BUMDes dan UMKM menerapkan pengelolaan dana desa dengan baik maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena dengan adanya BUMDes dan UMKM dapat tepenuhi. Pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa di desa Air Pinang masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Artinya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

melalui dana desa dengan bantuan modal belum dapat dimanfaatkan dengan baik.

Sedangkan dana desa untuk bagian pendidikan masih sangat minim karena dana desa hanya digunakan untuk biaya operasional PAUD karena pada dasarnya dana desa biaya besarnya di fokuskan untuk bidang infrastruktur. Belum terjadinya tingkat mutu pendidikan di desa Air Pinang karena masyarakatnya belum memahami pentingnya tingkat pendidikan dan faktor ekonomi masyarakat yang belum memadai.

### **5.1.1 Kaitan Hasil Penelitian dengan Teori yang digunakan**

Teori perubahan masyarakat menjelaskan bahwa adanya perubahan karena terjadinya ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat dan melahirkan pola kehidupan yang baru.

Menurut Marx, perubahan sosial terjadi melalui konflik. Konflik disini antara adalah dua kelompok yaitu pemilik modal dan pekerja. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan kondisi geografis, budaya material, struktur populasi, pandangan dunia, dan difusi atau penemuan baru dalam masyarakat, (Aprianingsih, 2019).

Teori konsep perubahan sosial mencakup semua perubahan lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk sikap, nilai sosial, pola perilaku dan kelompok masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan sosial yang merupakan gejala dari kehidupan setiap masyarakat. Hal ini terlihat dari kehidupan yang terbentang di masyarakat desa Air Pinang.

Perubahan sosial masyarakat desa Air Pinang setelah melalui program dana desa beradaptasi dengan perubahan pada saat yang bersamaan yaitu masyarakat selalu menginginkan adanya keseimbangan sosial dimana diharapkan pranata sosial dapat berfungsi dengan baik. Setiap kali keseimbangan pemerintah desa terpengaruh, selalu berusaha menstabilkan perubahan pranata sosial dengan menyesuaikan diri dengan perubahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat desa Air Pinang pada dasarnya memiliki beberapa kondisi yang kemungkinan dapat membawa perubahan pola pikir dan tindakan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat, perubahan disebabkan oleh kondisi situasional tertentu. Jika perasaan ketidakpuasan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama, maka dapat menimbulkan tekanan dan kekecewaan hingga suatu saat terjadi revolusi dalam masyarakat.

Tujuan atau luasnya perubahan sosial meliputi unsur geografis, ekonomi dan budaya. Setiap tempat atau desa mengalami perubahan dalam kehidupan menuju proses yang lebih baik. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan masa lampau. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidaksesuaian antar unsur sosial masyarakat sehingga mengubah struktur dan fungsi sebagian unsur sosial masyarakat.

Hasil penelitian melalui program dana desa berdasarkan konsep perubahan sosial dapat diartikan bahwa pembangunan merupakan suatu keusahaan yang direncanakan untuk mencapai tujuan berdasarkan norma-norma yang ditentukan. Proses pembangunan desa menjadi bagian penting

dalam mekanisme keinginan pemerintah yang disesuaikan dengan partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan suatu desa untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Perubahan sosial dalam masyarakat bukanlah hasil atau produk melainkan hasil kesepakatan atau keputusan bersama yang dibuat oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Keputusan yang diambil tentunya berdasarkan keinginan atau harapan kelompok sehingga terwujud perubahan sosial. Perubahan sosial disebabkan oleh unsur-unsur yang menjaga keseimbangan masyarakat seperti perubahan alam pada unsur geografis, biologi, ekonomi dan budaya.

Ekonomi dan budaya adalah masalah terbesar dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan disebabkan oleh sumber pendapatan keuangan yang tidak mencukupi untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti perilaku sosial dan lain-lain. Perubahan sosial bukanlah hasil tetapi proses. Proses perubahan ini tentunya merupakan hasil kesepakatan atau keputusan bersama yang dibuat oleh masing-masing individu atau kelompok. Keputusan yang diambil tentunya berdasarkan keinginan atau harapan kelompok sehingga terwujudnya perubahan sosial.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.2 Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dapat ditarik kesimpulan secara umum mengenai “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Sosial Ekonomi (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa Air Pinang)”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pemanfaatan sumber daya desa di Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ditinjau dari tingkat kesejahteraan masyarakat, kondisi kehidupan atau kebutuhan fisik baru dimulai. Penyediaan melalui pembangunan infrastruktur akses seperti jalan digunakan untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pelayanan pemerintah desa belum dilaksanakan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat. Secara normatif dan administratif, pengelolaan dana desa di Air Pinang memang tidak berjalan dengan baik, namun dari segi substansi penggunaan dana desa untuk perbaikan infrastruktur sudah dirasakan oleh masyarakat. Hal ini karena dana desa lebih banyak untuk pembangunan fisik dibandingkan untuk pemberdayaan masyarakat.

### 5.3 Saran

1. Saat merencanakan program terkait dana desa ditahun yang akan datang, sebaiknya dilakukan kajian pendahuluan terhadap kondisi dan dampak yang akan dikembangkan melalui dana desa.
2. Berkaitan dengan pelaksanaan program dari APBD, masyarakat harus memperhatikan realitas dilapangan dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa khususnya pekerja.
3. Pemerintah desa khususnya provinsi dan kabupaten harus selalu menggalakan pengawasan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalagunaan dan penyelewengan dana dari dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianingsih. (2019). Perubahan Sosial Pada Komunitas Petani Di Desa Dena Kecamatan Madapanga Kabupaten Bima. *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makasar* .
- Hatu, R. A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Onovasi*, 241-242.
- Ilham Zitri, R. R. (2020). Implementasi Dana Desa Dalama Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal Of Governance And Local Politics*, 166-167.
- Khairul Fiker Drs. Priyatno Harsasto, M. D. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. *Jurnal Of Politic and Goverment Studies* , 3-4.
- Lestari, E. R. (2015). Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Pилanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Jurnal Administrasi Negara*, 470-471.
- Lisa Mustika Berlinda, A. N. (2018). Kompetensi Komunikasi Guru Pendamping Khusus Di Sekolah Inklusi. *Jurnal Interkasi Online*, 4-5.
- Lumintang, J. (2015). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara 1. *Jurnal Acta Diurna*, 5-6.
- Mulyadi, M. (2015). Perubahan Sosial Masyarakat Agrararis Ke Masyarakat Industri Dalam Pembangunan Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Bina Praja*, 311-312.
- Permana, R. (2014). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Beru. *Jurnal Administrasi Negara*, 997-998.
- Rachman, M. (2013). Pengembangan Pendidikan Karakter Berwawasan Konservasi Nilai-Nilai Sosial. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, 9-10.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Jurnal Economis Development Analysis*, 116-117.

- Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat Langsa Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi Islam*, 255-256.
- Saputra, N. (2016). Analisis Pegelolaan Dana Desa Dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2015 (Studi Gampong Belakang). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Teuku Umar*.
- Suryono, A. (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 99-100.
- Yunita, E. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Gampong Pantom Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya . *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Teuku Umar*.
- Zunaidi, M. (2013). Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern . *Jurnal Sosiologi Islam*, 53-54.
- Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). (2021). *Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue Provinsi Aceh* .
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Tentang Pendapatan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 Tentang Dana Desa
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Masyarakat

## **BIODATA PENULIS**

### **A. BIODATA PRIBADI**

Nama : Oktaviana  
Tempat Tanggal Lahir : Air Pinang, 21 Oktober 1999  
Agama : Islam  
Alamat Tinggal : Dsn. Belang Padang, Desa Air Pinang  
Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten  
Simeulue  
No. Handphone : 082210134236

### **B. BIODATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Suriyanto  
Pekerjaan : Petani  
Alamat Tinggal : Dsn. Belang Padang, Desa Air Pinang  
Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten  
Simeulue  
Nama Ibu : Suharni  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Tinggal : Dsn. Belang Padang, Desa Air Pinang  
Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten  
Simeulue

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

Sekolah Dasar : SD Negeri 12 Simeulue Timur  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 06 Simeulue Timur  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 02 Teluk Dalam  
Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar

## PANDUAN WAWANCARA

1. Berapa besar dana desa yang diterima di desa ini?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa? Berapa persen untuk infrastruktur dan berapa persen untuk pemberdayaan masyarakat?
3. Apa saja yang dimanfaatkan dari dana desa dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa Air Pinang?
4. Program apakah yang paling Bapak/Ibu butuhkan untuk meningkatkan pendapatan dari dana desa?
5. Bagaimana dampak dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di desa Air Pinang?
6. Bagaimana dampak program dana desa terhadap peningkatan ekonomi?
7. Apakah dana desa bisa untuk bidang pendidikan?
8. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat sejak digelontarkannya dana desa?
9. Apa betul dana desa sudah tepat sasaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat?
10. Indikator kesejahteraan masyarakat di desa tersebut apa?

## DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Tokoh Masyarakat





## 2. Masyarakat





